

Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Sumber Daya manusia Di Wilayah Perbatasan

Oleh:

¹ Hesty Tambajong; ² Samel Ririhena; ³ Hubetus Oja ⁴ Paul Moento

^{1,3,4}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

²Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email. tambajong@unmus.ac.id

Abstrak

Propinsi Papua Selatan merupakan salah satu propinsi propinsi termuda dan juga propinsi yang berbatasan dengan negara lain, yaitu Papua New Guine. Pembentukan propinsi Papua Selatan dalam rangka pengembangan agar setiap daerah mampu mengolah potensi-potensi yang ada dalam daerah tersebut. Pengembangan potensi dimulai dari pengembangan sumber daya manusia, mulai dari masyarakat kecil, yaitu masyarakat kampung. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya pada kampung yang berada di daerah perbatasan yaitu Distrik Sota dan Distrik Ninati. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan data pengembangan kampung perbatasan, Metode analisis yang digunakan secara umum mencakup analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman berupa analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menaikkan kuota bantuan pendidikan di berbagai kementerian khusus pelajar Papua serta membangun infrastruktur bangunan sekolah dan ketersediaan tenaga pendidik. Pelatihan dan Pembinaan untuk masyarakat dan apparatus negara dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ekonomi dan Kesehatan, pemerintah menyediakan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan alat-alat Kesehatan serta tenaga Kesehatan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi; Pengembangan; Wilayah Perbatasan

Abstract

South Papua Province is one of the youngest provinces and also a province that borders another country, namely Papua New Guinea. The formation of the South Papua province in the context of development so that each region is able to cultivate the potential that exists in that region. Potential development starts with the development of human resources, starting from small communities, namely village communities. This research aims to analyze the government's strategy in developing human resources, especially in villages located in border areas, namely Sota District and Ninati District. The research uses qualitative research methods with literature studies and border village development data. The analytical methods used generally include qualitative descriptive analysis using analysis from Miles and Huberman in the form of interactive analysis. The results of this research indicate that the government's strategy for developing human resources in the education sector is to improve the quality of education and increase educational assistance quotas in various ministries specifically for Papuan students as well as building school building infrastructure and the availability of teaching staff. Training and Development for the community and state apparatus by providing training and guidance to improve skills and knowledge. Economy and Health, the government provides business capital to improve welfare and provides health equipment and health personnel to improve the quality of public health.

Keywords: Strategy; Development; Border Region

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan tujuan pembangunan nasional ini, wilayah perbatasan merupakan wujud yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengejar ketertinggalan dan pemerataan pembangunan dan dengan program nawacita Presiden Jokowi mencanangkan membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Propinsi Papua Selatan merupakan salah satu propinsi termuda yang terletak di wilayah perbatasan dengan jumlah kampung yang banyak dan masih ada kampung sangat sulit dijangkau dengan transportasi darat (Hendrayady, 2018) menyatakan bahwa wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal pembangunannya dibandingkan wilayah lain di Indonesia adalah wilayah perbatasan. Membangun wilayah perbatasan tidaklah mudah, hal ini dikarenakan perlu pemahaman tentang karakteristik wilayah tersebut dan kunci utama utamanya dimulai dari pengembangan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia merupakan asset penting untuk mencapai keberhasilan tujuan (Fadili, 2018). Karena Sumber daya manusia memiliki peranan sebagai agen perubahan, dimana sumber daya manusia itu berperan sebagai pelaksana dan penentu dalam melakukan suatu pembangunan.

Kampung Sota terletak di Distrik Sota Kabupaten Merauke dan Kampung Ninati yang berada di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digoel merupakan bagian dari kampung-kampung yang berada di wilayah perbatasan propinsi Papua Selatan. Jumlah penduduk yang tersebar di Kampung Sota kurang lebih 1442 jiwa terdiri dari 383 KK dengan mata pencaharian sebagian besar adalah berkebun. Sedangkan untuk jumlah penduduk kampung Ninati tidak kurang dari 40 KK atau sekitar 315 jiwa dengan pemetaan penduduk, perempuan sebanyak 147 jiwa, laki-laki sebanyak 166 jiwa, dan dengan mata pencaharian terbanyak yaitu petani kebun dan berburu di daerah hutan sekitar kampung atau di daerah dusun adat masyarakat tersebut. Kampung Ninati dan Kampung Sota memiliki banyak kesamaan, dimana mayoritas masyarakat lokal yang ada di kedua kampung mempunyai hubungan kekerabatan dengan masyarakat adat negara Papua New Guine. untuk masyarakat kampung Sota sudah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama yang merupakan kesatuan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau banyak suatu aturan tertib sosial, komunitas atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik terisolasi, serta memiliki struktur dan kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. (Sriyana, 2023)

Letak kampung Sota berada kurang lebih 80 kilometer dari ibukota kabupaten Merauke dengan akses jalan sangat baik, fasilitas umum yang tersedia, yaitu Puskesmas, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Gereja, Mushola, Masjid, Polsek serta adanya pos satgas TNI AD. Jumlah penduduk kampung Sota sekitar 393 KK atau sekitar 1.442 jiwa dengan mata pencaharian terbanyak dari masyarakat adalah berkebun. Kampung Sota yang merupakan ibukota distrik Sota Sedangkan akses jalan ke kampung Ninati belum

tersedia. Masyarakat harus berjalan kaki kurang lebih 3 jam perjalanan dengan rute jalan yang masih hutan, fasilitas umum belum tersedia.

Dilihat dari kedudukan kedua kampung ini, pemerintah sudah selayaknya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengacu pada dua pola pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan-permasalahan yang terkait topik penelitian ini, secara umum dapat diidentifikasi yaitu, letak kedua kampung yang berada di daerah tapal batas negara sangat mempengaruhi pola perkembangan masyarakat sehingga ketertinggalan masih sangat nampak dalam kehidupan masyarakat, pendidikan yang menjadi dasar masyarakat untuk maju masih sangat rendah dimana pola pikir masyarakat yang masih sangat konservatif dan budaya kedaerahan yang sangat kental sehingga belum mampu menerima perubahan, serta program-program pengentasan buta aksara masih belum optimal bahkan ada kepala kampung yang hanya mempunyai ijazah sekolah dasar. pemerintah distrik dan pemerintah kampung belum optimal dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di kedua kampung tersebut. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat di wilayah perbatasan tidak hanya sebatas pada aspek sosial, budaya ekonomi dan keamanan tetapi juga pada kesenjangan komunikasi dan informasi (Ririt Yuniar, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM sangat diperlukan sebab sebagai pemangku kebijakan dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penciptaan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia internasional. Kini Pemerintah daerah semakin tanggap dalam mengupayakan penciptaan regulasi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sarana prasarana Pendidikan, mengoptimalkan sistem Pendidikan, dan program-program pelatihan untuk masyarakat. Kolaborasi ketiga pendekatan ini utamanya terletak pada arah strategi dan rencana program kegiatan penerapan pengembangan wilayah perbatasan serta kebijakan yang dapat dibuat (Putri, 2023). Tujuan penelitian ini untuk menyikapi berbagai persoalan diatas perlu strategi yang tepat dalam membangun wilayah perbatasan yang berdasarkan pada pendekatan kesejahteraan, pendekatan sosial budaya dan pendekatan keamanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiono) penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran dengan berurutan mengenai keterangan ilmiah yang bersumber berdasarkan subjek atau objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa dan diinterpretasikan melalui beberapa tahapan, antara lain adalah reduksi data dengan cara mengklasifikasikan hal-hal yang penting, menyajikan data, dan terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh narasumber atau pihak informan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, suatu organisasi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan dengan keadaan lingkungan yang ada. Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi harus mampu berkembang untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di lingkungannya, di mana strategi harus mampu meresponi organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Itu sebabnya suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran apa yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan menerapkan model perencanaan dengan mempertimbangkan budaya masyarakat (Putri Malirja Nuhyanan)

Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal. Strategi juga diutarakan oleh Geoff Mulgan mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009)

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan) karena tujuan menentukan apa yang akan dicapai oleh pemerintah,, *Enviromtent* (Lingkungan) tempat yang dibentuk oleh pemerintah, *Direction* (Pengarahan) langkah-langkah yang harus dituju, *Action* (Tindakan) tindakan yang harus dilakukan, dan *Learning* (Pembelajaran) tahapan akhir yang harus ada.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Marlen Novita Makalew, 2021). Pemerintah melakukan banyak terobosan dalam percepatan pembangunan melalui berbagai program untuk pengembangan daerah mulai dari pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spritual terhadap keberhasilan aktivitas daerah yang dipimpin. (Fitriani, 2022)

Tujuan pengembangan SDM menurut pendapat (Martoyo, 2007) adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap terhadap tugas-tugas yang diemban. Kemudian ditegaskan kembali oleh Martoyo, bahwa tujuan pengembangan tersebut dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan/anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi. (Sims, 2006) menyatakan bahwa tujuan pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kinerja, sehingga aktivitas pengembangan SDM seharusnya dirancang dengan menggunakan informasi analisis jabatan yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Apabila tujuannya mengembangkan karyawan untuk promosi dan kemajuan yang akan datang, maka aktivitas pengembangan SDM harus diselaraskan dengan kriteria seleksi dalam penerimaan karyawan baru. Apabila tujuan pengembangan SDM untuk menciptakan budaya perubahan, maka akan lebih baik mengaitkan evaluasi kinerja dengan imbalan kerja (rewards) dalam pelaksanaan pengembangan SDM,

Hasil penelitian menemukan bahwa stratgei pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan masih belum optimal. Hal ini diidentifikasi oleh peneliti dikarenakan: (1) angka buta aksara masih tinggi untuk daerah perbatasan Papua Selatan (2) pendekatan pemerintah kepada masyarakat masih kurang sehingga pola pikir dan lingkungan social budaya yang sangat kental terus diterapkan (3) kesejahteraan yang belum sejahtera cenderung memilih untuk masuk hutan guna pemenuhan hidup daripada mendorong anak-anak bersekolah (4) belum ada program khusus yang berkelanjutan dari pemerintah untuk mendorong percepatan pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua selatan. Penelitian ini mendeskripsikan 5 indikator guna menemukan strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan, yaitu:

Tujuan (*Purposes*)

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan berencana dan berlanjut yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan, menciptakan, dan memelihara kapabilitas individu dan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi (Nadler, 1989). Tujuan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia di wilayah perbatasan untuk mengejar ketertinggalan agar pemerataan pembangunan berjalan secara efektif dan efiisien. Sejalan dengan hal tujuan pembangunan, maka efektif dan efisiensinya tujuan

ini harus didukung oleh semua pihak mulai dari pemerintah daerah sebagai motor penggerak, pemerintah kampung sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dan juga sebagai motivator dan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Papua selatan. Senada dengan hal ini, hasil penelitian yang dilakukan (Hendita Yosepa, 2020) mengatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia menuntut pola perubahan sikap dan tingkah laku yang mencakup mencakup 3 indikator, yaitu motivasi, kepribadian dan ketrampilan.

Lingkungan (*Environtment*)

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya (Soemarwoto, 2004). Kehidupan lingkungan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Papua Selatan cenderung kurang kondusif dikarenakan banyak faktor, terutama faktor kebutuhan akan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat lebih cenderung hidup menyesuaikan dengan musim. Dimana musim panas masyarakat akan bertani atau berkebun dan berburu di hutan, sedangkan musim hujan masyarakat lebih beraktivitas didalam rumah. Dari pola ini membentuk budaya masyarakat yang bergantung pada alam tanpa mampu mengolah lingkungan dengan lebih baik, agar di musim apapun masyarakat telah mempunyai cadangan kebutuhan pangan. Dalam penelitian yang dilakukan (Ririt Yuniar, 2023) kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan sangat bergantung dari budaya lokal dan struktur sosial sehingga mengakibatkan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat rendah.

Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan menurut (Terry, 2006) adalah membuat anggota kelompok agar mau bekerja sama secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam menjalankan strategi pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua Selatan, hal-hal yang menjadi urgensi dari pemerintah yaitu terkait pendidikan, kesehatan serta pelatihan dan pendampingan. Dari hasil penelitian, khusus pada pendidikan dan kesehatan, program-program pemerintah telah berjalan namun belum berkelanjutan sehingga masih perlu pengarahan-pengarahan secara teknis kepada masyarakat dalam hal pendidikan dimana motivasi kepada orang tua untuk mendorong anaknya bersekolah, menaikkan kuota bantuan pendidikan serta perbaikan sarana prasanana pendidikan dan kesehatan, yaitu ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga medis. Hal senada disampaikan (Aprinatho, 2022) bahwa pemerintah sebagai pengarah dalam kebijakan wajib melakukan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan (*Action*)

Tindakan yaitu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan maksud tertentu. Tindakan yang dimaksud disini yaitu tindakan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua Selatan. Sebagai sebuah aksi tindakan berupa hubungan sosial dan motivasi untuk mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam konteks hubungan sosial, berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenal 3 hubungan, yaitu (1) Hubungan sosial yang

berdasarkan tradisi (2) Hubungan sosial yang bersifat pada koersif/ tekanan yang menjadi rekayasa sosial pada kepemilikan otoritas kekuasaan (3) Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada rasionalitas yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial pada penyesuaian kepentingan yang di motivasi secara rasional atau persetujuan (Alis Muhlis, 2016). Tindakan yang wajib dilakukan pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melihat strata yang ada pada masyarakat (Tambajong, 2016). Data penelitian yang peneliti temukan bahwa pemerintah telah melakukan program-program untuk pengembangan sumber daya manusia, namun dorongan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari angka buta aksara yang sangat tinggi. Tindakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis pada peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera dan mandiri (Taufiqurokhman, 2023)

Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan tetapi juga merupakan aktifitas profesional yang menuntut menggunakan keterampilan dasar secara terpadu serta menciptakan situasi efisien (Puspitasari, 2012). Hasil penelitian dalam strategi pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua Selatan khususnya di kampung Ninati dan kampung Sota mendapati bahwa pola pembelajaran yang tepat agar memotivasi orang tua dan anak-anak untuk tetap mengenyam pendidikan yaitu dengan metode kearifan lokal. Hal ini disebabkan karena budaya kedaerahan masyarakat yang masih sangat kental sehingga segala sesuatu yang dilakukan pemerintah wajib disesuaikan dengan kearifan lokal daerah tersebut.

Proses pembelajaran merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang merupakan inisiatif yang datang dalam diri masyarakat itu sendiri. Namun Pembelajaran juga merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak luar untuk masyarakat sebagai proses pembelajaran,. Senada dengan pendapat dari Frizky Winandri Hapsari dan Lukman Arif (2023) menegaskan bahwa dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan langkah yang komperhensif (menyeluruh), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pemberdayaan. Dipertegas lagi oleh Konsep pemberdayaan merupakan upaya memberikan pertolongan, dorongan untuk masyarakat yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu berdaya baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Hamid, 2018).

Pemerintah Daerah perlu mendukung upaya pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya di wilayah kewenangannya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas SDM adalah adanya Perguruan Tinggi. Dalam pembangunan sumber daya manusia, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan terakhir. Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, perguruan tinggi memiliki tujuan dan tanggung jawab yang signifikan. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan

Tinggi Swasta (PTS). PTN adalah perguruan tinggi, menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 6 dan 7 yang mendirikan dan yang sebagai penyelenggaranya adalah pemerintah, sedangkan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh swasta. PTN dan PTS berbeda dalam hal pengoperasian dan pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut.

Hidayat dan Delyuzer dalam Azizah (2013) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan daerah. Maka kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan Pembangunan daerah. Pembangunan suatu daerah telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM sangat diperlukan sebab sebagai pemangku kebijakan dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penciptaan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia internasional. Kini Pemerintah daerah semakin tanggap dalam mengupayakan penciptaan regulasi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sarana prasarana Pendidikan, mengoptimalkan sistem Pendidikan, dan program-program pelatihan untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Pembangunan suatu daerah bukan hanya terletak pada kemajuan infrastruktur melainkan pada pengembangan sumber daya manusia. Pada penelitian ini peneliti menemukan jawaban bahwa pemerintah dalam menentukan strategi untuk pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Papua Selatan harus menitikberatkan pada pola pendekatan masyarakat dengan berbasis kepada kearifan lokal. Hal ini dilihat dari budaya masyarakat yang sangat kedaerahan sehingga membentuk pola pikir yang masih konvensional dan sangat terbatas untuk menerima metode-metode penerapan baru dalam pendidikan maupun pelatihan. Strategi ini diharapkan dapat memberi gambaran kecil kepada pemerintah daerah di Propinsi Papua Selatan.

Strategi selanjutnya sinergitas antara pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat sangat dibutuhkan untuk pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat terkait program-program yang diberikan pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia sehingga wilayah perbatasan Papua Selatan mampu berkembang dan maju. Hal ini untuk Penelitian ini menemukan jawaban dari rumusan permasalahan, berupa strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah perbatasan adalah strategi dengan memadukan kearifan lokal setempat dalam setiap program-program yang dilakukan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alis Muhlis, N. N. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Living Hadis*, 242-258.
- Aprinatho, S. H. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Buntubuda. *JPCS*, 744-746.
- Azizah. (2013). Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Mutu Hidup serta Pengaruhnya terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(04), 144–152
- Fadili, D. A. (2018). Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Pengembangan Sdm Terhadap Kinerja Karyawan. *Buana Ilmu*, 80-85.
- Fitriani. (2022). Model Kecenderungan Perilaku Pemimpin Birokrasi. *Societas*, 65-81.
- Hendita Yosepa, A. S. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi . *Ilmu Manajemen*, 741-747.
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *JUAN*, 1-10.
- Marlen Novita Makalew, S. S. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Governance*, 1-9.
- Martoyo, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Yogyakarta: BPFE.
- Mulgan, G. (2009). *The Art Of Public Strategi*. Oxford: University Press.
- Puspitasari, I. H. (2012). *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: FAMILIA.
- Putri Malirja Nuhuyan, H. T. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *MJPA*, 70-75.
- Putri, L. R. (2023). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Guna Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Sosial Pembangunan: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (Ri) – Republik Demokratik Timor Leste (Rdtl) Di Atambua Kabupaten Belu Provi. *Konstituen*, 145-165.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Ririt Yuniar, I. R. (2023). Potret Masyarakat Perbatasan Papua: Interaksi, Dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Analisis Komunikasi. *Ilmu Komunikasi*, 431-446.
- Sims, R. R. (2006). *Human Resource Development; Today and Tomorrow*. USA: Information Publishing Inc.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sriyana. (2023). Keserasian Sosial Masyarakat Majemuk Di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Anterior*, 73-80.

- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi. Jakarta: Alfabeta.
- Tambajong, H. (2016). Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Aparatur Negara Yang Profesional (Sebuah Kajian Teoritis) . Societas Unmus, 46-57.
- Taufiqurokhman, d. (2023). Kebijakan Pemerintah Memajukan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul. Swatantra, 189-206.
- Terry, G. (2006). Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.